



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: MBG tetap jalan di masa libur sekolah, pimpinan komisi VIII dukung kebijakan BGN
Tanggal	: Selasa, 23 Desember 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 5

MBG Tetap Jalan Di Masa Libur Sekolah

Pimpinan Komisi VIII Dukung Kebijakan BGN

DPR menyambut baik kebijakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tetap menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Saat ini sekolah memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dari akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026.

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko mengatakan, MBG di masa libur sekolah merupakan langkah strategis menjamin keberlanjutan pemenuhan gizi anak. Utamanya peserta didik di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) seperti madrasah dan satuan pendidikan keagamaan.

"Masa libur sekolah justru merupakan periode yang rawan terjadi penurunan asupan gizi, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan secara ekonomi," ujar Singgih dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).

Diketahui, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, program MBG tetap berjalan meski sekolah libur. Pihaknya sudah menyiapkan sejumlah alternatif penyaluran menu bagi siswa di masa libur Nataru 2025/2026. "Penyaluran MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita akan berjalan sebagaimana mestinya," ujar Dadan di Jakarta, Minggu (21/12/2025).

Sedangkan untuk siswa sekolah, dapur MBG akan melakukan inventarisasi berapa jumlah anak yang bersedia mengambil makanan MBG ke sekolah. "Awal libur diberikan makanan

siap santap untuk maksimal 4 hari dengan menu berkualitas seperti telur, buah, susu, abon atau dendeng," imbuh Dadan.

Singgih melanjutkan, keberlanjutan MBC selama libur sekolah adalah bukti negara tidak boleh libur dalam melindungi hak dasar anak, termasuk hak atas pangan dan gizi yang layak. Penyediaan menu MBC berupa satu paket siap santap dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dua paket MBG kemasan yang bisa dibawa pulang berisi roti, telur, susu, dan buah juga sudah sesuai angka kecukupan gizi.

Singgih menambahkan, berbagai data menunjukkan masalah gizi masih menjadi tantangan serius nasional. Prevalensi stunting anak Indonesia memang menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. "Tapi masih berada pada angka yang memerlukan intervensi berkelanjutan dan terintegrasi," kata dia mengingatkan.

Berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Risksdas) terbaru, melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional sebesar 19,8 persen. Sehingga, masih perlu upaya keras untuk mencapai



Singgih Januratmoko

target 2025 (18,8 persen) dan mengatasi masalah gizi lain seperti gizi buruk dan kurang gizi kronis. Khususnya di provinsi dengan kasus tertinggi seperti Jabar, Jateng, dan Jatim.

Untuk itu, Singgih menekankan akelerasi implementasi MBG di madrasah dan pesantren sebagai ekosistem strategis dalam pembinaan generasi bangsa. "Dengan jumlah santri yang mencapai jutaan dan mayoritas tinggal di asrama, pesantren memiliki kebutuhan gizi yang spesifik dan berkelanjutan," kata legislator asal dapil Yogyakarta ini.

Pesantren, tambah dia, menjadi pusat pendidikan keagamaan dan pembentukan karakter sumber daya manusia (SDM). Sehingga, program MBG harus dirancang secara adaptif untuk pesantren, baik dari sisi menu, sistem distribusi, maupun pengelolaan dapur sehat berbasis pesantren.

Berdasarkan data Kemenag 2025, terdapat lebih dari 42.391 pesantren dengan jumlah santri sekitar 4,3 juta santri di seluruh Indonesia. Lingkungan pesantren, dengan karakteristik asrama dan pengelolaan konsumsi yang terpusat, merupakan lokus yang sangat tepat sekaligus strategis untuk implementasi program gizi berkelanjutan.

Singgih menyarankan sinergi dan integrasi data antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BGN dengan Kemenag dalam memaknai dan mengintegrasikan data penerima MBG lebih akurat. Data ini mencakup jumlah santri, kondisi dapur, kebutuhan gizi secara spesifik sehingga penyaluran MBC bisa lebih tepat sasaran.

Model penyaluran MBG disarankan lebih adaptif di lingkungan sekolah madrasah dan pesantren. Selain paket kemasan, juga perlu diptertiimbangkan model dapur pesantren dengan pendampingan ahli gizi, *supply chain*, bahan pangan lokal dan edukasi gizi bagi pengelola dapur.

Dia menegaskan, MBG di sekolah Kemenag merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam melindungi dan memenuhi hak anak atas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. "Dengan kolaborasi semua pihak, program ini akan berkontribusi besar dalam mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berakhlaq mulia," tandasnya.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudin menambahkan, MBG di masa libur sekolah adalah upaya menjaga kesinambungan pemenuhan gizi anak. Karena libur sekolah tidak otomatis berarti kebutuhan gizi anak terpenuhi dengan baik di rumah.

"Pada sebagian keluarga, terutama kelompok rentan, justru masa libur berpotensi menurunkan kualitas asupan gizi anak," ujar Hetifah dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).

Karena itu, Hetifah mendorong agar MBC perlu tetap dijalankan sebagai langkah preventif atau pencegahan agar status gizi anak tetap terjaga meskipun proses belajar mengajar sedang libur.

Namun, Hetifah memberikan sejumlah catatan untuk BGN agar program MBG di masa libur tak kacau balau. Pertama, penyelesaian jenis menu. Selama masa libur, MBG disalurkan dalam bentuk menu kering atau tahan simpan seperti abon, roti, atau bolu sehingga lebih aman dan praktis.

Kedua, lanjut dia, harus ada pengukuhan kerja sama dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal. Hal ini agar suplai bahan MBG terjaga sekaligus memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Ketiga, koordinasi yang rapi antara SPPG, sekolah, murid, dan wali murid agar data penerima manfaat akurat dan distribusi berjalan tertib serta tepat sasaran. ■ TIF